

## TINJAUAN PERKEMBANGAN POLITIK

**Riuh Penjaringan Capres, Korupsi SKK Migas dan Tragedi Penegakan Hukum***Vidhyandika Djati Perkasa*

## PENGANTAR

Dinamika perpolitikan di Indonesia semakin riuh dan ‘memanas’ menjelang diselenggarakannya pesta demokrasi di tahun 2014, yaitu pemilihan anggota legislatif dan Presiden. Tidak saja publik ‘dihibur’ dengan ramainya beberapa partai politik besar mengumumkan calon Presiden (capres) yang akan diusung, seperti partai Golkar dengan Aburizal Bakrie, Gerindra dengan Prabowo Subianto, Hanura dengan Wiranto, PAN dengan Hatta Rajasa, dan PPP dengan Suryadharma Ali, akan tetapi publik juga dibuat ‘penasaran’ dengan siapa bakal calon Presiden yang akan diusung Partai Demokrat dan PDIP. Partai Demokrat saat ini masih disibukkan dengan pelaksanaan Konvensi Partai Demokrat, sedangkan masih menjadi tanda-tanya besar apakah Joko Widodo (Jokowi) akan diusung sebagai calon Presiden dari PDIP.

Selain itu, publik juga terkejut dengan tertangkapnya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini atas dugaan menerima gratifikasi dan tertangkapnya Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Akil Mochtar yang tersangkut gratifikasi dan korupsi kasus Pilkada di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah dan di Kabupaten Lebak, Banten.

Korupsi di Migas menjadi bukti masifnya korupsi yang melembaga di berbagai sektor di negara ini. Sedangkan tertangkapnya Ketua MK, menandakan semakin melemahkan kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Analisis peristiwa politik edisi ini akan membahas peristiwa-peristiwa tersebut di atas.

## KONVENSI PARTAI DEMOKRAT

Sejak wacana akan diselenggarakannya konvensi Partai Demokrat, berbagai pendapat pun bermunculan. Di satu sisi konvensi ini dianggap positif di alam demokrasi. Konvensi Partai Demokrat telah mengubah tradisi partai politik yang selama ini terkenal tertutup dari aspirasi pihak luar. Dengan demikian, melalui konvensi ini Partai Demokrat telah dianggap melakukan terobosan untuk menghilangkan oligarki politik yang sejak lama telah menjadi catatan buruk di partai politik.<sup>1</sup>

Akan tetapi di sisi lain, konvensi ini memang krusial diselenggarakan dengan dua alasan utama. *Pertama*, sebagai upaya Partai Demokrat untuk memperbaiki citra partai yang sudah terlanjur rusak karena berbagai skandal korupsi. Misalnya, kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, yang banyak menyeret kader Partai Demokrat dan kroni-kroninya. Harga yang harus dibayar partai ini karena berbagai skandal korupsi ini memang sangat mahal.

Dari berbagai survei, tingkat kepercayaan publik terhadap partai ini semakin turun. Survei tersebut juga menunjukkan semakin meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang identik sebagai pendiri partai Demokrat. Dengan demikian citra partai ini rusak tidak saja karena skandal korupsi kader demokrat, akan tetapi juga karena kinerja Presiden SBY dalam memimpin negara ini yang tidak maksimal.

Setelah melalui proses yang panjang, para peserta konvensi Partai Demokrat adalah: (1) Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan); (2) Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina); (3)

---

<sup>1</sup> 'Kategori Peserta Konvensi Dibedakan', *Republika*, 26 Agustus 2013.

Dahlan Iskan (Menteri BUMN); (4) Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat); (5) Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI); (6) Gita Wiryawati (Menteri Perdagangan); (7) Hayono Isman (Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat); (8) Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah); (9) Marzuki Ali (Ketua DPR); (10) Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat); dan (11) Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).<sup>2</sup>

Ada 4 tokoh lain yang juga diundang mengikuti konvensi, tetapi akhirnya menolak, yaitu Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden dan Ketua PMI), Mahfud MD (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Rustriningsih (mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah) dan Rusdi Kirana (Direktur Utama Lion Air). Jusuf Kalla menolak mengikuti konvensi karena merasa tidak etis bahwa selain masih sebagai anggota Partai Golkar, ia juga mantan Ketua Umum Partai Golkar. Penolakan ini masuk akal karena bila terpilih nanti, Jusuf Kalla harus menjadi kader Partai Demokrat.

Mahfud MD menolak terkait soal hak dan kewajiban peserta setelah konvensi selesai. Mahfud juga mempersoalkan AD/ART Partai Demokrat yang mengatakan majelis tinggi partai Demokrat yang sekarang dijabat SBY berhak menentukan siapa calon Presiden yang pantas diusung. Hal ini bertentangan dengan aturan konvensi. Sementara itu, Rustriningsih menolak karena masih menjadi kader PDIP. Sedangkan Rusdi Kirana mengatakan akan mengikuti konvensi 5 tahun mendatang.<sup>3</sup>

Secara garis besar, konvensi ini memang nampak jelas dijadikan sebagai ajang menaikan popularitas Partai Demokrat, sekaligus memperbaiki citra partai. Melihat sempitnya waktu untuk 'memperbaiki diri', apalagi pemilu legislatif dan Presiden tinggal beberapa bulan ke depan, konvensi ini dianggap sebagai 'amunisi' yang ampuh untuk cepat memperbaiki citra dan meningkatkan elektibilitas partai tersebut.

<sup>2</sup> 'Konvensi Demokrat Sepi Peminat', *Tempo*, 8 September 2013.

<sup>3</sup> 'Tiga Calon Tolak Ikut Konvensi', *Kompas*, 30 Agustus 2013; 'Persoalan AD/ART, Mahfud Mundur', *Republika*, 30 Agustus 2013.

Tampaknya Partai Demokrat membaca apa yang disukai publik, misalnya dengan memakai 'jargon' berbau demokrasi, karena upaya menjangkir peserta melalui konvensi serta proses konvensi juga dianggap mengikuti kaidah nilai-nilai yang demokratis, seperti persaingan yang sehat, terbuka dan pemenang konvensi akan ditentukan oleh publik melalui sebuah survei. Nilai nasionalisme dan pluralisme secara tidak langsung juga diterapkan. Siapa saja berhak mengikuti konvensi ini tanpa harus melihat latar belakang agama, etnis dan kesukuan.

Selain itu mereka mengusung tokoh-tokoh yang dianggap bersih dan berintegritas. Hal tersebut nampak dari calon-calon yang diusung dalam partai konvensi ini, misalnya Dahlan Iskan, ataupun Mahfud MD. Tokoh-tokoh ini adalah '*eye-catching*' di mata publik karena dianggap punya *track-record* yang bagus. Secara ekstrim, partai ini cenderung '*mendompleng*' para peserta konvensi yang diusung dan dianggap punya *track record* bagus di mata publik demi menaikkan popularitas Partai Demokrat.

*Kedua*, secara internal, partai Demokrat sudah 'babak-belur'. Partai ini babak belur tidak saja karena skandal korupsi yang menghasilkan friksi internal partai, partai ini juga dianggap gagal melaksanakan proses pengkaderan untuk mengantisipasi pasca SBY tidak menjabat kembali. Dengan kata lain, partai ini kekurangan figur-figur yang potensial untuk dapat dijadikan calon Presiden. Sejak kasus Hambalang terungkap, makin nampak nyata friksi internal partai dan bisa diibaratkan ada dikotomi antara loyalitas kepada SBY dan kepada mantan ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Ada yang mensiyanlir konvensi ini juga sebagai upaya untuk menggeser dan meminggirkan loyalis Anas. Hal ini memang terbukti karena pada saat Konvensi Partai Demokrat diselenggarakan dan para calon konvensi diumumkan ke publik pada tanggal 15 September 2013, pada saat bersamaan Anas mendirikan ormas PPI (Perhimpunan Pergerakan Indonesia). Acara tersebut dihadiri loyalis Anas seperti I Gede Pasek Suardika (Ketua Komisi III DPR), Saan Mustopa (Sekretaris Fraksi Partai Demokrat) dan Ahmad Mubarok (anggota Dewan Pembina Partai Demokrat). Tak lama setelah itu, I Gede Pasek dan Saan Mustopa 'di rotasi' dari jabatannya. Pencopotan kedua tokoh

Demokrat tersebut dianggap sebagai upaya pembersihan terhadap loyalis Anas Urbaningrum.<sup>4</sup>

Konvensi Partai Demokrat dapat diibaratkan sebagai sebuah 'opera sabun' yang masih sulit diketahui jalan akhir dari ceriteranya. Tampaknya penggagas konvensi ini memang menempuh 'resiko' yang besar. Apakah benar dengan konvensi ini citra partai Demokrat akan dapat diperbaiki atau malah semakin melanggengkan friksi internal atau bahkan membuat friksi baru? Dengan mayoritas peserta konvensi (7 orang) yang berasal dari luar Partai Demokrat, tentu menjadi 'pemantik' friksi yang baru. Saling serang antara peserta konvensi yang berasal dari kader Demokrat dan di luar partai tersebut tidak terhindarkan. Misalnya, usulan dari peserta konvensi dari kader Demokrat supaya para peserta konvensi dari luar partai untuk menanggalkan jabatannya atau tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye.<sup>5</sup> Memang masuk akal kalau ada rasa gusar para kader partai yang merasa sudah loyal dan susah payah membangun partai, akan tetapi justru seperti 'dianak-tirikan'.

Selain itu, juga ada keragukan di mata para pengamat dan publik, apakah konvensi ini dapat memilih capres secara jujur dan independen, meski dijelaskan bahwa pemenang konvensi nantinya akan ditentukan oleh survei publik yang dijamin tingkat independensinya. Publik sudah membaca bahwa SBY cenderung 'menganak-emaskan' Pramono Edhie Wibowo untuk diusung sebagai capres dari Partai Demokrat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa SBY akhirnya tetap merupakan 'kingmaker' di partai ini.<sup>6</sup>

Terlepas dari situasi tersebut, kesebelas peserta konvensi Partai Demokrat harus berjuang *'all-out'* agar dapat menjadi pemenang konvensi ini. Karena tidak saja tingkat popularitas mereka masih jauh di bawah calon Presiden yang diusung partai lain, akan tetapi mereka juga jauh kalah populer dari Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI

<sup>4</sup> 'PD Bersihkan Loyalis Anas', *Bisnis Indonesia*, 19 September 2013, 'Loyalis Anas Dicapot', *Kompas*, 19 September 2013.

<sup>5</sup> 'SBY Ademkan Tensi Konvensi', *Republika*, 13 September 2013.

<sup>6</sup> Seperti dikemukakan pengamat politik LIPI Siti Zuhro, 'Presidential Election: Yudhoyono calls the shots in Dem primary', *The Jakarta Post*, 2 September 2013.

yang namanya kian meroket sebagai salah satu figur kuat calon Presiden untuk pemilu 2014.

### FENOMENA JOKOWI DAN RAKERNAS PDIP

Jokowi seperti tidak pernah kering dan sepi dari pemberitaan. Setelah kemenangannya yang spektakuler dan tidak terduga sampai menjadi Gubernur DKI Jakarta, namanya kembali disebut sebagai bakal calon Presiden 'terkuat' dari PDIP, dengan syarat apabila ia mendapat restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Makin naiknya pamor Jokowi sebagai calon presiden telah mengubah secara signifikan dalam konstelasi politik di negara ini. Meroketnya nama Jokowi menjadi calon presiden yang dikehendaki rakyat, bukan tanpa dasar. Dari hasil survei yang dilakukan 10 lembaga, elektabilitas Jokowi selalu di atas 20 persen dan bahkan ada lembaga yang mencatat angka 68 persen. Survei dari CSIS misalnya, mencatat keunggulan Jokowi sebesar 28,6 persen, dibandingkan Prabowo Subianto 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,5 persen dan Hatta Rajasa 2,2 persen. Sedangkan survei dari LSI mencatat keunggulan Jokowi sebesar 35,2 persen dibandingkan Jusuf Kalla 21,2 persen, Hatta Rajasa 17,1 persen, Mahfud MD 15,1 persen, Suryadharma Ali 2,9 persen, Muhaimin Iskandar 2,2 persen dan Anis Matta 1,9 persen. Pada survei yang dilakukan secara internal terhadap kader PDIP di semua cabang pada akhir Juli 2013, Jokowi mendapat dukungan 60 persen dan Mega hanya 30 persen. Sementara itu, jajak pendapat yang dilakukan dengan metode yang sama awal September 2013, memperlihatkan bahwa dukungan untuk Jokowi naik sebesar 80 persen.<sup>7</sup>

Meskipun dukungan kepada Jokowi sebagai calon Presiden naik terus, ada masalah eksternal dan internal yang menyertai 'proses pencalonannya'. Secara eksternal, jelas langkah Jokowi akan 'dihambat' oleh calon Presiden dari partai lain yang tidak menghendaki Jokowi untuk maju. Sementara itu, apabila Jokowi maju, dipastikan tidak akan ada kompetisi yang berarti dengan capres-capres yang lain dan Jokowi diramalkan akan menang mutlak. Misalnya, keberatan dari

<sup>7</sup> 'Di Panggung Punggung Partai Banteng', *Tempo* 15 September 2013.

Prabowo Subianto sebagai capres dari partai Gerindra. Supaya Jokowi tidak mencalonkan diri, pengurus Gerindra selalu ‘mingkatkan’ PDIP pada kontrak politik antara PDIP dan Gerindra yang dibuat pada tahun 2009, waktu Megawati dan Prabowo sepakat untuk berkoalisi. Salah satu butir dalam kontrak tersebut menyatakan kesediaan Megawati mendukung Prabowo pada pilpres 2014 nanti. Klausul lain mengatur rumusan pembiayaan kampanye dan saksi pada pemilu 2009.

Menurut beberapa politikus PDIP, Megawati menganggap kesepakatan itu telah dilanggar sesuai pemilu 2009. Misalnya dalam aspek pembiayaan kampanye yang tidak dipenuhi Gerindra.<sup>8</sup> Alasan lain, kontrak tersebut dibuat dengan asumsi koalisi memenangi pemilu.<sup>9</sup> Dengan demikian kontrak tersebut dianggap tidak mengikat. Masalah yang lain terkait internal PDIP, dimana ada tiga faksi yang berbeda pendapat. Kelompok yang dianggap konservatif tetap menginginkan Megawati untuk maju berpasangan dengan Jokowi. Kelompok yang lain menginginkan Jokowi berpasangan dengan Puan Maharani, Ketua Fraksi PDIP di DPR. Kelompok yang lain menginginkan Jokowi dipasangkan dengan calon dari partai lain.<sup>10</sup> Megawati sepertinya tidak mau ambil pusing dengan adanya faksi-faksi terkait bakal capres PDIP. Megawati secara rutin memanggil Jokowi ke kediamannya; ibarat memberi ‘bekal’ kepada Jokowi sebelum diusung menjadi calon Presiden. Selain itu, Megawati juga mendekati beberapa tokoh di luar PDIP, seperti Mahfud MD, Sri Mulyani dan Jusuf Kalla. Hal ini disinyalir sebagai bagian untuk menjaring bakal calon Wakil Presiden untuk dipasangkan dengan Jokowi.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke III PDIP 6 September 2013 yang lalu yang ditunggu-tunggu publik sebagai ajang untuk mengumumkan secara resmi Jokowi sebagai capres yang akan diusung PDIP ternyata tidak terjadi. Meskipun demikian, Jokowi tetap menjadi ‘bintang’ di perhelatan tersebut karena didaulat oleh Megawati untuk membacakan naskah *Dedication of Life*, surat dari Presiden

---

<sup>8</sup> *ibid.*

<sup>9</sup> Kontrak lain juga dibuat ketika kedua partai mengajukan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan Gubernur DKI 2012.

<sup>10</sup> ‘Di Panggung Punggung Partai Banteng’, *Tempo* 15 September 2013.

Soekarno pada 10 September 1966 yang menggambarkan pentingnya pengabdian kepada rakyat dan negara. Di Rakernas tersebut, meski Jokowi tidak secara gamblang diumumkan sebagai bakal calon Presiden dari PDIP, Megawati telah memberi sinyal-sinyal. Misalnya saja, pada waktu Jokowi membacakan *'Dedication of Life'*, Megawati mengatakan 'Jokowi mendapatkan getaran Bung Karno' Di pidato tersebut, Megawati juga beberapa kali menyebut kata 'regenerasi' atau menyebut nama Jokowi.

Yang menonjol dalam Rakernas tersebut justru kriteria capres, yaitu orang Jawa dan pernah menjadi kepala daerah, kriteria ini kembali merujuk ke Jokowi. Rakernas ini merupakan acara penting yang dipakai Megawati untuk mendengarkan aspirasi rakyat melalui pandangan umum oleh pengurus daerah PDIP, dan memang sudah terbukti dukungan mayoritas pengurus daerah untuk mencalonkan Jokowi.

Kata kunci dari 'drama' Jokowi ini adalah waktu atau *'timing'*. Kapan sebaiknya waktu yang tepat untuk mengumumkan Jokowi sebagai capres dari PDIP? Tidak dapat dipungkiri yang terjadi adalah 'perang' antar berbagai strategi politik. Di satu sisi ada usulan untuk mengumumkan Jokowi sebagai capres seawal mungkin. Hal ini akan membantu mendongkrak suara PDIP di pemilu legislatif di bulan April 2014 nanti. Kemenangan PDIP di pemilu legislatif otomatis akan memuluskan upaya pencalonan Jokowi karena *presidential threshold* sudah dicapai dan bahkan dilampaui.

Tapi disisi lain, sisi yang 'dianut' Megawati, saat ini perlu fokus dulu untuk mengamankan 20 persen kursi atau 25 persen suara di DPR pada Pemilu Legislatif 2014 tanpa perlu Jokowi 'di-expose' terlebih dahulu. Strategi politik ini juga menganut paham *'risk-averse'*, artinya terlalu beresiko untuk mengumumkan Jokowi terlalu awal untuk menghindari serangan-serangan dan jegal dari lawan politiknya. PDIP tetap membutuhkan Jokowi dengan citranya yang tidak 'bercacat-cela'.

Seperti yang disinyalir Tempo mencatat beberapa serangan yang akan dihadapi Jokowi. Misalnya, *pertama*, serangan dari Gerindra yang menuduh Jokowi tidak konsisten dan rakus kekuasaan bila mencalonkan diri sebagai Presiden. *Kedua*, penjegalan prosedural seperti



yang dikemukakan anggota DPRD Jakarta. Bila Jokowi akan maju harus minta ijin dari DPRD Jakarta terlebih dahulu. *Ketiga*, pretasi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta belum kelihatan.<sup>11</sup> Strategi lain yang kemungkinan diterapkan Megawati adalah membiarkan kader daerah menyebut Jokowi sebagai capres sebagai bagian untuk memenangkan pemilu legislatif. Dengan strategi ini mereka yang tidak memilih PDIP selama ini akan beralih pada partai tersebut karena tertarik figur Jokowi.<sup>12</sup> Kemungkinan yang lain, nama Jokowi akan diumumkan pada tanggal 10 Januari 2014 nanti bertepatan dengan HUT PDIP, tapi rencana ini tidak disetujui beberapa kader partai loyalis Jokowi karena dianggap terlambat dan bisa mengganggu konsolidasi dari kader partai di seluruh Indonesia karena waktunya terlalu singkat.<sup>13</sup>

Memang sulit untuk menilai strategi politik mana yang paling tepat atau yang paling ampuh. Sepertinya semua strategi tersebut mempunyai resiko. Sehingga yang perlu dipertimbangkan adalah memilih strategi mana yang mengandung resiko yang paling minim. Eforia Jokowi 'yang kebablasan' yang tidak ditangani dengan baik juga dapat menjadi bumerang yang berdampak negatif bagi kondisi internal PDIP. Misalnya saja, ada kader PDIP yang selalu menjelek-jelekan Jokowi atau anti Jokowi, seperti petinggi PDIP Effendi Simbolon atau karena 'mendadak Jokowi' ini ada upaya untuk mengadu-domba antara Jokowi dan Megawati atau antara loyalis Jokowi dan loyalis Megawati, meski adu domba tersebut belum terbukti.<sup>14</sup>

Yang terbukti justru loyalitas Jokowi pada Megawati. Jokowi tetap dingin' dan cenderung tidak mau ikut larut dalam eforia ini karena menyerahkan sepenuhnya pada Megawati. Kohesi antara Megawati dan Jokowi dan konsolidasi partai tetap terpelihara karena sikap Jokowi yang berpolitik dengan etika. Seperti pada kasus konvensi partai Demokrat, kita tetap menunggu dengan sabar dan penasaran hasil akhir dari drama fenomena 'mendadak Jokowi' ini.

---

<sup>11</sup> 'Cara Mega Menimang Jokowi', *Tempo*, 15 September 2013

<sup>12</sup> *ibid.*

<sup>13</sup> 'Loyalis Jokowi Panasi PDIP', *Republika*, 12 September 2013

<sup>14</sup> 'Mega Jokowi Diadu Domba', *Republika*, 13 September 2013

## BISNIS DAN POLITIK: KORUPSI DI SKK MIGAS

Korupsi, suap ataupun gratifikasi ibarat virus ganas yang mudah menyerang ke semua instansi, baik pemerintah dan non-pemerintah. Kali ini SKK Migas yang terkena gilirannya. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini tertangkap basah oleh KPK menerima uang US\$ 400 ribu dan sepeda motor klasik BMW yang diserahkan Devi Ardi, pelatih golf Rudi serta Simon Gunawan Tanjaya, Komisariss Kernel Oil. Ketiganya langsung dijadikan tersangka. 'Harta karun' yang lain juga ditemukan di rumah Rudi sebesar US\$ 90 ribu dan Sin\$ 127 ribu. Di kantor Rudi kembali juga ditemukan uang Sin\$ 60 ribu dan US\$ 2000 serta emas batangan sekitar 180 gram. Ada juga uang US\$ 30 ribu dari kotak simpanan Rudi di Bank Mandiri. KPK juga menggeledah kantor Sekretaris Jenderal Menteri ESDM Waryono Karno dan kembali menemukan US\$ 200 ribu. Beberapa pejabat tinggi di SKK Migas untuk sementara di cekal dan di-non aktifkan.

Suap dan korupsi yang dilakukan Rudi diduga sebagai bagian dari Kernel Oil untuk menyogok Kepala SKK Migas tersebut untuk memenangkan tender penjualan minyak mentah bagian pemerintah dari lapangan yang dikelola kontraktor asing. Kernel Oil disinyalir mengincar atau dijanjikan minyak mentah dari Duri, Senipah dan Banyuurip.<sup>15</sup>

Kasus dengan Kernel Oil ternyata membuka 'borok' dan penyimpangan-penyimpangan lain di SKK Migas yang juga melibatkan Menteri ESDM Jero Wacik, yaitu yang dikenal dengan 'kasus Husky'. Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas berencana membelokkan gas yang telah dialokasikan untuk pabrik PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang ke Bali. Rencana ini diduga merupakan bagian untuk menguntungkan rekanan kedua pejabat tersebut. KPK mencium permainan ini dan negara dipastikan akan dirugikan sampai miliaran rupiah.

Di suatu lembaga yang menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 1 triliun per hari dan salah satu penyumbang pajak terbesar, tidak heran SKK Migas rawan penyimpangan, apalagi lembaga ini juga minim pengawasan.<sup>16</sup> Nuansa bisnis dan politik sangat kental

<sup>15</sup> Laporan Utama *Tempo*, 25 Agustus 2013.

<sup>16</sup> 'Aturan Lama, Pemain Baru', *Tempo*, 25 Agustus 2013.

disini. Dari data yang ditemukan KPK, mendekati tahun Pemilu 2014, semakin banyak proyek dan kebutuhan anggaran meningkat. Dengan demikian ada asumsi suap kepada Kepala SKK Migas terkait dengan dana untuk konvensi Partai Demokrat, meski asumsi tersebut akhirnya dibantah.

Selain itu, karena ditemukannya dolar di laci maka telah diendus 'permainan' baru yang melibatkan PT Surya Parna Niaga yang merupakan bagian dari bisnis Surya yang didirikan Marihad Simon Simbolon. PT yang baru berumur 7 bulan tersebut disinyalir akan berbisnis dengan Kernel Oil di industri hulu migas. PT tersebut mempunyai posisi yang kuat karena dibantu Doddy Yusgiantoro, adik mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan dekat dengan wakil ketua Komisi Energi DPR Effendi Simbolon.<sup>17</sup> Bisnis di SKK Migas juga melibatkan petinggi negara yang lain. Kernel Oil disebut dekat dengan petinggi Partai Golkar seperti Setya Novanto, Agung Laksono dan Ali Mochtar Ngabalin. Pejabat atau menteri lama pun ditengarai masih punya 'peran' di lembaga ini, seperti mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang kini menjabat menteri Pertahanan.

Sejak Rudi diangkat menjadi Kepala SKK Migas, dia banyak melakukan pergantian dalam jajaran deputy di instansi tersebut. Yang menonjol adalah digantinya dua mantan pejabat KPK yang dipekerjakan di SKK Migas, Lambok Hamonangan Hutauruk dan Budi Ibrahim. Lambok dan Budi merupakan 'orang-orangnya' Purnomo dan Priyono. Dengan demikian ada dugaan prahara yang menimpa Rudi merupakan 'dampak' dari 'adu kuat kubu Priyono-Purnomo dengan kubu Rudi dan Jero Wacik dalam menempatkan orang-orangnya dalam struktur jabatan di SKK Migas.<sup>18</sup>

Sampai tulisan ini dibuat, KPK masih memanggil saksi-saksi yang lain untuk mengembangkan kasus korupsi di SKK Migas ini. Kasus Kernel Oil hanyalah pintu masuk untuk membongkar korupsi masif di lembaga ini yang melibatkan 'gurita-gurita' yang lain dalam dunia bisnis dan politik yang melibatkan elite politik strata atas yang

<sup>17</sup> 'Gara-gara Dolar di Laci', *Tempo*, 1 September 2013

<sup>18</sup> 'Adu Kuat Pejabat Migas', *Tempo*, 8 September 2013.

sudah menyatu dengan erat. Praktik korupsi di instansi ini cenderung sudah lama mengalami proses ‘pembiaran’ alias tanpa pengawasan yang mengarah ke tindakan hukum. Hal ini bisa jadi dikarenakan memang banyak aktor yang terlibat maupun menuai manfaat dari instansi ini. Dengan demikian, kunci pembersihan SKK Migas dari praktik korupsi, suap dan gratifikasi bisa dimulai pada bagaimana upaya membangun akuntabilitas, transparansi dan pengawasan di instansi ini. Hukum tentunya juga harus tegak diimplementasikan.

### TRAGEDI PENEGAKAN HUKUM

Upaya penegakan hukum di Indonesia tidak pernah sepi dari pemberitaan. Ironisnya, berita yang mendominasi adalah berita-berita negatif yang menempatkan para ‘aktor’ penegak hukum justru sebagai ‘pelaku’ penyimpangan penegakan hukum. Tidak berlebihan mengatakan bahwa upaya penegakan hukum di Indonesia sudah ‘babak-belur’. Tidak ada lagi institusi penegakan hukum yang layak dipercaya lagi, apalagi setelah Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, terkena kasus korupsi terkait beberapa putusan kasus pilkada. Inisiatif MA (Mahkamah Agung) untuk menjatuhkan hukuman tiga kali lebih berat bagi para terdakwa koruptor dan pencucian uang hampir tidak ada artinya.

Setelah tertangkapnya banyak jaksa, pengacara dan hakim dalam penyimpangan-penyimpangan hukum, dalam 3 bulan terakhir ada beberapa kasus pelanggaran hukum yang terjadi. *Pertama*, kasus suap Mario Bernardo. Mario merupakan pengacara di kantor pengacara Hotma Sitompoel. Mario diduga menyuap anggota staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung (MA), Djodi Supratman. Mario tertangkap berusaha menyuap Djodi dengan uang Rp 78 juta. Uang ini diduga sebagai upaya untuk mengamankan kasus penipuan yang berhubungan dengan Hutomo Wijaya Ongowarsito, direktur PT Sumber Calcium Pratama yang tengah masuk kasasi. Dua hakim MA, Mohammad Zaharuddin Utama dan Andi Abu Ayyub Saleh diduga juga terlibat dalam kasus ini.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> ‘Suap Mario Di Kantor Hotma’, *Tempo*, 11 Agustus 2013.

*Kedua*, kasus dikabulkannya permohonan peninjauan kembali Sudjiono Timan, bekas Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang berstatus buron setelah divonis 15 tahun penjara pada tahun 2004. Atas dasar putusan 4 hakim Mahkamah Agung, Sudjiono di vonis bebas. Hanya satu hakim yang berbeda pendapat. Menurut hakim yang menyatakan *dissenting opinion*, peninjauan kembali (PK) itu harusnya dari awal ditolak karena sesuai Undang-Undang, yang berhak mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya.<sup>20</sup> Ahli waris dapat mengajukan permohonan PK bila terpidana sudah meninggal. Padahal tidak di dapat bukti sama sekali terpidana sudah meninggal. Disinyalir ada dugaan suap kepada keempat hakim tersebut sehingga mengabulkan permohonan PK Sudjiono yang akhirnya mengarah pada pembebasannya.

*Ketiga*, ada dua kasus penyimpangan hukum lainnya terkait seleksi calon hakim agung yang dilakukan anggota DPR. Meskipun sudah berlalu, disinyalir ada dugaan anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Demokrat pernah mencoba menawarkan uang masing-masing Rp 200 juta kepada tujuh unsur pimpinan Komisi Yudisial (KY). Peristiwa tersebut terjadi dalam uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung tahun 2012. Selain itu, yang baru terjadi adalah upaya 'deal' antara Bachrudin, anggota DPR dari fraksi partai Kebangsaan Bangsa dengan Sudrajad Dimiyati, seorang calon hakim agung pada uji seleksi calon hakim agung di DPR 18 september 2013 yang lalu. Kedua masalah tersebut masih dalam penyelidikan dan ada usulan untuk memangkas wewenang DPR agar tidak terlibat lagi dalam seleksi pejabat negara, khususnya seleksi hakim agung.<sup>21</sup>

*Keempat*, peristiwa penangkapan Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi benar-benar menghebohkan dan ibarat meruntuhkan fondasi hukum di negara ini. Akil Mochtar ditangkap KPK pada tanggal 2 Oktober 2013 di rumah dinas setelah tertangkap tangan menerima sejumlah uang dalam mata uang dolar Singapura dan Amerika yang setara dengan Rp2 - Rp3 miliar. Selain Akil, juga

<sup>20</sup> 'Putusan Ironis Untuk Sang Buron', *Tempo*, 8 September 2013.

<sup>21</sup> 'Seleksi Hakim Agung: Anggota Komisi III Pernah Tawarkan Uang', *Kompas*, 19 September 2013; 'KY: Yang Tawarkan Uang dari Demokrat', *Kompas*, 21 September 2013; 'Seleksi Pejabat Publik: Marzuki: Ada Deal di Balik Pemilihan', *Kompas*, 22 September 2013.

ditangkap Chairun Nisa, anggota DPR dari Partai Golkar<sup>22</sup> dan seorang pengusaha asal Palangkaraya Cornelis Nalau di rumah Akil tersebut. Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih ditangkap beberapa jam kemudian.<sup>23</sup>

Penangkapan Akil diduga terkait penyelesaian sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Meskipun Hambit ditetapkan sebagai pemenang pilkada, tetapi ada gugatan dari pasangan Alfridel Jinu-Ude Arnold Pisi dan Jaya Samaya Monong-Daldin. Uang suap untuk Akil dari Hambit diduga sebagai upaya untuk mengamankan posisinya sebagai Bupati Gunung Mas. Akil dijadikan tersangka karena kasus tindak pidana korupsi dan suap dengan ancaman seumur hidup. Ketiga orang lainnya yang ditangkap terkait kasus Akil juga telah dijadikan tersangka.

KPK terus mengembangkan kasus Akil dan kembali ada dugaan suap kepada Ketua MK tersebut terkait sengketa pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Kasus ini melibatkan Susi Tur Andayani, seorang pengacara dan Tubagus Chaeri Wardana yang merupakan adik kandung Gubernur Banten, Ratu Atut. Uang sebesar Rp 1 miliar yang diduga akan diserahkan kepada Akil merupakan milik Tubagus. Tubagus merupakan anggota tim sukses calon pasangan Bupati Lebak Amir Hamzah-Kasmin yang dikalahkan pasangan Iti Oktavia Jayabaya dan Ade Sumardi.<sup>24</sup> Perintah menyuap Akil diduga berasal dari perintah Ratu Atut yang akhirnya dicekal KPK.

Pasca penangkapan Akil, KPK terus memburu harta Akil beserta orang-orang lain yang terlibat dalam kasus tersebut dan memeriksa orang-orang disekitar Akil. Dalam proses penggeledahan di meja kerja Akil juga ditemukan 3 linting ganja dan 2 butir ekstasi. Belum dapat dipastikan apakah Akil sebagai pemakai dari ganja dan ekstasi tersebut. Setelah pemeriksaan lanjutan, Akil diduga juga melakukan pencucian uang. Ditemukan CV RS yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa yang berlokasi di Pontianak yang dimiliki isteri Akil, Ratu Rita Akil. Di CV tersebut Akil diduga menstansfer

<sup>22</sup> Chairun Nisa juga masih terdaftar sebagai calon anggota legislative untuk Pemilu 2014 di daerah pemilihan Kalimantan Tengah

<sup>23</sup> 'KPK Tangkap Ketua MK', *Kompas*, 3 Oktober 2013.

<sup>24</sup> 'Sengketa Pilkada Jerat MK', *Kompas*, 4 Oktober 2013.

uang sebagai hasil korupsi terkait penyelesaian sengketa pilkada. Dalam rekening tersebut ditemukan dana sebesar Rp 100 miliar.<sup>25</sup>

Kasus yang menimpa Akil tidak saja merusak pilar hukum di Indonesia, akan tetapi juga mendelegitimasi peran MK di ranah hukum. Masyarakat juga cenderung 'curiga' dengan sepak terjang anggota 8 hakim konstitusi. Mereka didaulat secara transparan mengumumkan harta kekayaannya. Ada juga yang mengusulkan para hakim konstitusi tersebut untuk sementara 'dibekukan' terlebih dahulu. Putusan-putusan sengketa pilkada yang selama ini ditangani MK juga mulai dipertanyakan validitasnya.

Tantangan terberat sekarang adalah bagaimana mengembalikan wibawa dan legitimasi MK. Presiden SBY mengumumkan 5 langkah penyelamatan MK, antara lain audit eksternal MK, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap MK melalui penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK supaya dilaksanakan lebih cepat dan konklusif dan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang antara lain akan mengatur persyaratan, aturan dan seleksi hakim.

Rencana menerbitkan Perppu ini banyak ditentang karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Misalnya Arif Wibowo dari Badan Legislasi DPR mengatakan 'MK itu lembaga negara yang kewenangannya dapat dan diatur konstitusi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Maka tidak boleh diatur dalam Perppu'.<sup>26</sup> Wacana lain yang berkembang untuk menyelamatkan MK adalah perbaikan sistem internal di MK, termasuk dalam sistem pengawasan. Tidak kalah penting adalah perlu segera memperbaiki perekrutan hakim konstitusi. Perlu ada aturan mekanisme pemilihan hakim yang lebih transparan, bertanggung jawab dan partisipatif di lingkungan MA (Mahkamah Agung), DPR dan Presiden. Usulan lain menyangkut upaya memangkas kewenangan MK, terutama untuk menyelesaikan sengketa pilkada.<sup>27</sup> Penanganan sengketa pilkada diusulkan untuk ditangani MA.

---

<sup>25</sup> 'Akil Diduga Cuci Uang Miliaran Lewat CV RS', *Kompas*, 9 Oktober 2013.

<sup>26</sup> 'Banyak Yang Tolak Perppu', *Kompas*, 8 Oktober 2013.

<sup>27</sup> *ibid.*

## PENUTUP

Dari uraian di atas, seperti ada benang merah yang bisa ditarik. Tahun depan, negara ini akan menyelenggarakan dua perhelatan besar dan penting dalam sistem demokrasi, yaitu pemilu legislatif dan Presiden. Momentum ini sangat penting sebagai pintu masuk utama untuk memilih pemimpin yang mempunyai legitimasi, berkualitas, kredibel, tidak cacat moral dan berintegritas. Penyelenggara konvensi Partai Demokrat mempunyai harapan bahwa pemimpin ideal tersebut akan terpilih melalui konvensi ini. Sedangkan euforia Jokowi menandakan bahwa rakyat kritis dan tahu figur Presiden seperti apa yang mereka dambakan. Pemilu jangan hanya dilihat sebagai mekanisme 'ritual' untuk memasukan orang yang haus kuasa dan harta serta cacat moral. Mekanisme pemilu harus diperbaiki dengan melibatkan orang yang profesional, aturan dijalankan dengan benar, dilandasi penegakan hukum yang dilaksanakan dengan benar serta diawasi oleh orang atau lembaga yang berintegritas.

Dua 'aktor' penting akan menjadi 'output' dari pemilu ini, yaitu DPR dan Presiden. Mereka yang akan menjadi 'nahkoda' dalam menjalankan roda pemerintahan di negara ini. Peran DPR dan Presiden strategis untuk menyeleksi dan menetapkan pejabat negara yang penting. Bila satu aktor 'bermasalah' atau keduanya bermasalah, bisa dibayangkan dampaknya. Sepertinya sampai saat ini, pemilu hanya dipandang sebagai ritual. Dampak dari penyelenggaraan pemilu yang tidak teratur ditambah dengan tidak jalannya mekanisme pengawasan yang "ter-intitusionalisasi" serta belum maksimalnya pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dalam tataran eksekutif, legislatif dan yudikatif yang kita rasakan. Korupsi masif merajalela dan 'melembaga' di hampir semua sendi kehidupan di negara ini seperti pada kasus di SKK Migas. Ironisnya dalam tiga kasus baik di SKK Migas, seleksi hakim agung maupun di kasus korupsi Akil Mochtar di MK, semua melibatkan anggota DPR. Selain itu para pejabat negara yang terkena kasus juga hasil seleksi DPR. Jadi sepertinya memang ada yang salah disini.



Ada empat langkah penting yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan negara dari kehancuran sebagai akibat korupsi dan krisis legitimasi di tataran eksekutif, legislatif, yudikatif: perbaiki penyelenggaraan pemilu, perbaiki rekrutmen dan sistem seleksi pejabat negara supaya akuntabel dan transparan, perbaiki mekanisme pengawasan baik secara internal kelembagaan maupun antar kelembagaan, dan memperkuat mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil. Peran masyarakat sudah terbukti penting untuk membantu KPK membongkar kasus-kasus korupsi yang telah melembaga.